

**SEJARAH SENI PERTUNJUKAN: PENCIPTAAN DAN
PERKEMBANGAN SENI TARI DI SULAWESI SELATAN 1960-2000-AN**



Oleh:

IBNU KHAIR

F81115307

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2021

SKRIPSI

**SEJARAH SENI PERTUNJUKAN: PENCIPTAAN DAN
PERKEMBANGAN SENI TARI DI SULAWESI SELATAN
1960-2000-AN**

Disusun dan diajukan oleh:

IBNU KHAIR

F811 15 307

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 26 Agustus 2021
dan dinyatakan telah memenuhi sejumlah persyaratan.



Dr. Ilham, S.S., M.Hum.
NIP. 19760827 200801 1 011

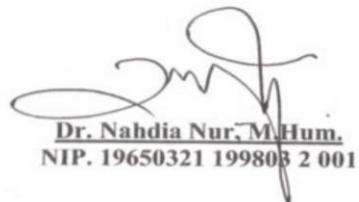
Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S
NIP. 19641217 199803 1 001

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin**



**Ketua Departemen Ilmu Sejarah
Universitas Hasanuddin**



**FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

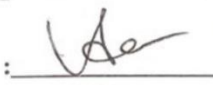
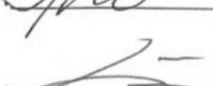
Pada hari Kamis, 26 Agustus 2021, Panitia Ujian Skripsi Departemen Ilmu Sejarah telah menerima dengan baik skripsi yang berjudul:

**SEJARAH SENI PERTUNJUKAN: PENCIPTAAN DAN
PERKEMBANGAN SENI TARI DI SULAWESI SELATAN
1960-2000-AN**

yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 26 Agustus 2021

PANITIA UJIAN SKRIPSI

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|---|
| 1. Dr. Ilham, S.S., M.Hum. | Ketua | : |  |
| 2. Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S | Sekretaris | : |  |
| 3. Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum. | Penguji I | : |  |
| 4. Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.Ag. | Penguji II | : |  |
| 5. Dr. Ilham, S.S., M.Hum. | Konsultan I | : |  |
| 6. Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S | Konsultan II | : |  |

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ibnu Khair
NIM : F81115307
Program Studi/Fakultas : Ilmu Sejarah/Ilmu Budaya
Judul Skripsi : SEJARAH SENI PERTUNJUKAN: PENCIPTAAN DAN
PERKEMBANGAN SENI TARI DI SULAWESI SELATAN
1960-2000-AN.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemkiiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Oktober 2021

Yang menyatakan



Ibnu Khair

KATA PENGANTAR

Segala puji atas rahmat Tuhan yang Maha Esa, akhirnya setelah sekian tahun mengemban pendidikan di Departemen Ilmu Sejarah Universitas Hasanuddin, Skripsi sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana (S1) dapat selesai dengan segenap kemampuan penulis. Hal ini tak lepas dari bantuan, dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak, baik itu yang membantu secara langsung maupun hanya sebatas dorongan moral saja. Dengan ini, penulis coba sebutkan beberapa pihak yang selayaknya mendapatkan apresiasi berkat selesainya penelitian ini, antara lain;

1. Keluarga yang selalu mengingatkan serta memberikan dukungan dan doa dalam pendidikan ini, yakni Abdul Rahim, Hj. Yuhanidu, Dahlia dan St. Maryam Bahri.
2. Himpunan Mahasiswa Departemen Ilmu Sejarah Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, sebagai sarana belajar berorganisasi dan hal-hal di luar pembelajaran formal di kelas.
3. Semua orang yang pernah terlibat bersama dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Menulis Universitas Hasanuddin, sebagai tempat penulis belajar mengeksplorasi aspek-aspek literasi dan kepenulisan.
4. Armita Iswardani sebagai rekan yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan energi positif dalam melalui hari-hari proses penulisan skripsi ini.
5. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Dias Pradadimara atas kebijaksanaanya dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga mendapatkan konsep-

konsep penelitian ini. Serta, kepada Alief Nursitudju selaku kawan dan pembimbing setia dalam menjawab setiap keresahan-keresahan saya.

6. Kepada Ilham Dg. Makkelo sebagai pembimbing satu, juga kepada panitia penguji Rasyid Rahman dan Ida Liana, penulis ucapkan terima kasih atas saran dan masukannya pada saat pelaksanaan ujian meja.
7. Halilintar Lathief, sosok seniman besar sekaligus inspirasi dan penyumbang terbesar dalam bahan penulisan skripsi ini, saya haturkan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kebaikan hati beliau.

Makassar, 7 Oktober 2021

Ibnu Khair.

Dedicated to our teacher, Halilintar Lathief.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR GAMBAR	IV
ABSTRAK	V
ABSTRACT	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Batasan Masalah	9
3. Rumusan Masalah	10
4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
4.1 Tujuan Penelitian	11
4.2 Manfaat Penelitian	11
5. Tinjauan Pustaka	11
6. Metode Penelitian	14
7. Sistematika Penulisan	17

BAB II TINJAUAN AWAL SULAWESI SELATAN DAN SENI PERTUNJUKAN 1930-AN SAMPAI 1960-AN

1. Sulawesi Selatan di Sekitar Akhir Pemerintahan Hindia-Belanda Sampai
Awal Orde Lama20
2. Makassar dalam Peranannya Sebagai Ibukota Pasca Kemerdekaan.....22
 - 2.1 Politik.....22
 - 2.2 Ekonomi.....26
3. Kebudayaan di Sulawesi Selatan Dekade 1930-an sampai Orde Lama.....29
4. Seni Pertunjukan di Sulawesi Selatan 1930-an Sampai 1960-an..... 35

BAB III KEBIJAKAN KEBUDAYAAN DAN PERKEMBANGAN AWAL SENI TARI DI SULAWESI SELATAN ERA ORDE BARU

1. Kebijakan Kebudayaan Orde Baru di Sulawesi Selatan 43
2. Penemuan Kembali Seni Pertunjukan di Sulawesi Selatan Era Orde Baru
.....45
 - 2.1 Perkembangan Awal Seni Tari di Sulawesi Selatan Era Orde Baru
.....47
 - 2.1.1 Seni Tari Sebagai Ekspresi Spritual51
 - 2.1.2 Seni Tari Profan 52
3. Ciri-ciri Umum Tari-tarian di Sulawesi Selatan 53
 - 3.1 Ciri Tari-tarian Makassar 55
 - 3.2 Ciri Tari-tarian Mandar 59
 - 3.3 Ciri Tari-tarian Toraja 62
 - 3.4 Ciri Tari-tarian Bugis 63

4 Fase Penciptaan Seni Tari di Sulawesi Selatan 1970-an : Selayang Pandang	64
--	----

BAB IV PENCIPTAAN DAN PERKEMBANGAN SENI TARI SULAWESI SELATAN 1970-AN SAMPAI 2000-AN

1. Halilintar Lathief dalam Masa-masa Awal Penciptaan Seni Tari Sulawesi-Selatan tahun 1970-an.....	67
1.1 <i>Tari Cinna Guria</i>	68
1.2 <i>Siri' Na Kecapi</i>	68
1.3 <i>Buah Khuldi/Silariang</i>	68
1.4 <i>Abbatireng ri Polipukku</i>	68
1.5 <i>Massagala</i>	68
1.6 <i>Tompang</i>	69
2. Halil di Yogyakarta : Dari Profan Kembali ke Ritual Tahun 1979-1984.....	69
2.1 <i>Embrio Gugur I</i>	70
2.2 <i>Musibah Thampomas II</i>	71
2.3 <i>Eksperimen Seni: Perjalanan</i>	73
2.4 <i>Inikah Ini</i>	73
2.5 <i>Anarkis</i>	74
2.6 <i>Gubahan Massa</i>	74
2.7 <i>Menuju ke X</i>	75
2.8 <i>Seni Eksperimen: Upacara I</i>	76
3. Babak Pertama Penciptaan Seni Tari Ritual 1986-1989 di Makassar.....	76

3.1 <i>Seni Ekspreimen: Terminal A1</i>	77
3.2 <i>Sere Pallanro</i>	78
3.3 <i>Pattasi</i>	80
3.4 <i>Hae</i>	82
3.5 <i>Semaphore</i>	83
3.6 <i>Datu' Cemmani</i>	84
4. Babak Kedua Penciptaan Seni Tari Ritual 1990- awal 2000-an di Makassar.	85
4.1 Di Atas Puing-Puing.....	86
4.2 Tanah	87
4.3 Katalepsi I	89
4.4 Toddopuli Temmalara	92
4.5 GurudaE	93
4.6 Matinya Sang Kucing	94
4.7 Alekawa	94
5. Dinamika Seni Tari dalam Pengalaman Panjang Halilintar Lathief	96
BAB V KESIMPULAN	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	105

DAFTAR GAMBAR

	Hlm
Gambar 1.1 Peta Persebaran Suku Sulawesi Selatan.....	35
Gambar 2.1 Foto Penampilan Tari Kreasi Baru Sulawesi Selatan	62
Gambar 4.1 Pamphlet Pertunjukan <i>Tari Cinna Guria</i> 1975	76
Gambar 4.2 Pamphlet Pertunjukan <i>Musibah Thampomas II</i> 1981.....	81
Gambar 4.3 Pamphlet Pertunjukan <i>Inikah Ini</i> 1982	85
Gambar 4.4 Dokumentasi Pertunjukan <i>Sere Pallanro</i> di TVRI 1986	90
Gambar 4.5 Dokumentasi Pertunjukan <i>Pattasi</i> 1987.....	92
Gambar 4.6 Dokumentasi Upacar 1 dan Upacara 2	94
Gambar 4.7 Dokumentasi Pertunjukan <i>Datu Cemmani</i> di TVRI 1989	96
Gambar 4.8 Dokumentasi Pertunjukan <i>Datu Cemmani</i> di TVRI 1989	99
Gambar 4.9 Dokumentasi Pertunjukan <i>GurudaE</i> 1997	101
Gambar 4.10 Dokumentasi Pertunjukan <i>Alekawa</i> 2006	104

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk merekonstruksi kebudayaan melalui sejarah seni pertunjukan, yang secara khusus melihat perkembangan dan penciptaan seni tari di Sulawesi Selatan. Dimulai pada saat seni tari muncul kembali ke permukaan pada tahun 1960-an sampai awal 2000-an. Meskipun pada awal kemunculannya, seni tari di Sulawesi Selatan lebih menonjolkan sisi profan dibandingkan nilai-nilai tradisi sebagai fundamental seni tari. Namun, hal tersebut bisa dibilang mampu menempatkan seni tari sebagai wadah pelestarian kebudayaan. Hingga pada pertengahan tahun 1970-an, Halilintar Lathief seorang seniman tari mulai menciptakan seni pertunjukan dan atau seni tari ke dalam unsur-unsur ritual, dan sedikit demi sedikit mengembalikan seni profan ke dalam bentuk upacara.

Dalam penelitian, penulis menggunakan metode sejarah sebagai alat analisis dan interpretasi. Sumber-sumber utama yang digunakan diambil berdasarkan wawancara narasumber sebagai pelaku sejarah, juga menggunakan arsip-arsip pribadi narasumber yang berkaitan dengan sejarah seni tari dan sejumlah tari-tarian yang diciptakan sebagai bahan rekonstruksi. Adapun secara signifikan dapat kita lihat perubahan corak penciptaan seni tari dari profan ke ritual dimulai ketika Halilintar Lathief pertama kali menciptakan karyanya pada tahun 1975 yaitu Tari Cinna Guria menggunakan filosofi cerita rakyat Sulawesi Selatan. Pada titik itu, diciptakanlah karya-karya seni tari yang tidak hanya sekadar sebagai tontonan dan hiburan publik, tapi sebagai sarana ritual dan upacara sebagaimana prinsip seni tari yang alami dan natural.

Kata kunci: Seni Pertunjukan, Seni Tari, Kebudayaan, Profan, Ritual, Upacara, Halilintar Lathief.

ABSTRACT

This thesis aims to reconstruct culture through the history of performing arts, which specifically looks at the development and creation of dance in South Sulawesi. It started when the art of dance reappeared in the 1960s and early 2000s. Even though at the beginning of its appearance, the art of dance in South Sulawesi emphasized the profane side more than traditional values as the fundamentals of dance. However, this can be said to be able to place the art of dance as a place for cultural preservation. Until the mid-1970s, Halilintar Lathief, a dance artist, began to create performing arts and/or dance into ritual elements, and gradually returned profane art to ceremonial forms.

In this research, the writer uses the historical method as a tool of analysis and interpretation. The main sources used were taken based on interviews with sources as historical actors, also using personal archives of sources related to the history of dance and a number of dances created as reconstruction material. We can see a significant change in the style of dance creation from profane to ritual, starting when Halilintar Lathief first created his work in 1975, namely the Cinna Guria Dance using the philosophy of South Sulawesi folklore. At that point, dance works were created which were not only for public spectacle and entertainment, but as ritual and ceremonial means as the principles of natural and natural dance were created.

Keywords: Performing Arts, Dance, Culture, Profan, Ritual, Ceremony, Halilintar Lathief.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Paul Willis dalam pengantarnya pada buku *Cultural Studies*¹ karya Chris Barker mengutarakan bahwa setiap individu atau sebuah komunitas memiliki kecenderungan untuk mempunyai dan menciptakan kebudayaannya sendiri. Untuk itu, kebudayaan dipandang sebagai sesuatu yang memiliki relasi satu sama lain dengan manusia, sebagaimana yang mengondisikan kebudayaan itu ada. Kita dapat melacak bentuk-bentuk relasi tersebut, dari bentuk interaksi individu maupun sosial di tengah masyarakat, proses pembentukan norma-norma sosial, semisal; bahasa, teks-teks, gambar-gambar atau pola perilaku. Lebih jauh lagi, kebudayaan adalah sesuatu yang ditentukan oleh faktor ekonomi, politik dan ideologi tertentu yang hadir sebagai hegemoni penguasa atau orang-orang yang memiliki *privilege* dalam bidang tertentu, seperti pemimpin negara dan daerah, tetua adat, tokoh agama, seniman, dsb.

Melalui logika materialisme historis, kita melihat bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang erat berkaitan dengan proses produksi maupun reproduksi makna oleh masyarakat, dengan memperhatikan tatanan kondisi kehidupan material (situasi politik, ekonomi dan sosial) mereka. Dengan kata lain, kebudayaan adalah sesuatu yang

¹ Buku ini membahas mengenai “kebudayaan” sebagai suatu kajian dan teori yang dibangun oleh para pemikir yang memandang produksi pengetahuan teoretis sebagai sebuah praktik politik.

diciptakan secara sengaja maupun tidak disengaja, atas dasar relasi kuasa yang berlaku di tengah-tengah kondisi aktual masyarakat.¹ Seolah memberikan istilah yang sederhana, Raymond William, melalui Barker, memaknai kebudayaan sebagai bentuk “keseluruhan cara hidup.” Ia mengutarakan, bahwa kebudayaan merupakan pengalaman yang dihidupi, melalui beragam tanda dan makna bagi semua individu di dalam menjalani hidupnya.²

Sebagai salah satu bagian dan relasi dari kebudayaan, kesenian atau lebih tepatnya seni pertunjukan,³ menjadi bagian penting yang terus berkembang dari masa ke masa, dalam pengkajian sejarah kesenian dan kebudayaan di Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan di masa setelah kemerdekaan. Pada era Hindia Belanda, beraneka ragam tarian dan musik ritual telah ditampilkan secara teratur di lingkungan istana-istana kerajaan atau para penguasa tradisional dan di kawasan pedesaan Sulawesi

¹ Chris Barker, *Cultural Studies: Teori dan Praktik* (Bantul: Kreasi Wacana, 2004), hlm. 51-53.

² *Ibid.*, hlm. 43. Terjadi perdebatan yang cukup besar mengenai pengertian “kebudayaan” di Indonesia oleh beberapa ahli. Sutan Takdir Alisjahbana (1908-1994) misalnya, ia berpendapat bahwa Kebudayaan Nasional Indonesia merupakan kebudayaan yang diciptakan oleh manusia Indonesia Modern, terputus dengan zaman pra-Indonesia. Sedangkan Ki Hadjar Dewantara (1889-1959) menilai bahwa Kebudayaan Nasional Indonesia adalah puncak dari kebudayaan masing-masing daerah, dimana setiap daerah di Indonesia memiliki puncak-puncak kebudayaan yang mewakili satu provinsi. Ini berbeda dengan pengertian kebudayaan saat ini dari sudut pandang kajian budaya, yang menjelaskan bahwa kebudayaan ialah sesuatu yang dibuat dengan kesengajaan, sebagai bagian dari kebijakan politik.

³ Seni pertunjukan (*performing art*) ialah karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok di tempat dan waktu tertentu.

Selatan.⁴ Beberapa ritual bergenre tari yang sering dipertunjukkan pada masa itu ialah seperti tari *pakarena* (Makassar), *pagellu'* dan *mabadong* (Toraja), serta *pajaga* dan beberapa tarian *bissu* (Bugis). Dalam bahasa Bugis, tari disebut dengan *sere*, *jaga*, *jogek*, *katia* atau *sajo*. *Sere* berarti “mondar-mandir kian kemari,” sedangkan *jaga* berarti “tetap waspada” dengan tidak tidur semalaman. Setiap istilah tersebut di atas diberikan awalan “ma-“, sebagai penambahan kata kerja *majogek* yang berarti “berjoget” atau “menari.” Awalan “pa-“ sebagai imbuhan yang menandakan seseorang selaku pelaku atau penerinya.⁵

Pada era 1940-an hingga 1970-an, beragam kesenian tradisional di Sulawesi Selatan, termasuk seni tari/tari-tarian, masih bersifat praktik ritual dan penghormatan terhadap lingkungan atau alam dimana suatu masyarakat hidup menetap.⁶ Kondisi Sulawesi Selatan yang sangat tidak stabil karena adanya pergolakan politik pada akhir 1940-an hingga 1950-an, telah mengakibatkan terjadinya kemunduran terhadap perkembangan seni pertunjukan lokal, termasuk seni tari, selama beberapa tahun. Perubahan terhadap seni tari di Sulawesi Selatan mulai terjadi sejak 1960-an, ditandai

⁴ R. Anderson Sutton, *Pakkurru Sumange' Musik, Tari, dan Politik Kebudayaan Sulawesi Selatan* (Makassar: Penerbit Ininnawa, 2013), hlm. 62.

⁵ Halilintar Lathief, Niniek Sumiani HL, *Pustaka Wisata Budaya: Tari Daerah Bugis (Tinjauan melalui bentuk dan fungsi)* (Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional, 2000), hlm. 39.

⁶ Alief Nur Situdju M.N. Nadjamuddin, Sahriana, dan Isna Tahir, “*Transformasi Teater Tradisional Kondo Buleng dan Kontinuitas Elemen Bahari*”, (Makassar: *Lensa Budaya*, Vol. 12 (2), 2017), hlm. 49.

dengan adanya upaya untuk beradaptasi terhadap kuatnya perubahan politik, sosial, ekonomi dan estetika di Indonesia. Tantangan perubahan yang begitu kuat itu, ditandai dengan terjadinya komodifikasi terhadap bentuk-bentuk seni pertunjukan yang berakar dari praktik ritual dan penyusunan kembali atau “penciptaan”⁷ seni pertunjukan guna memenuhi ekspektasi komersial, sehingga dikemas untuk beragam jenis penonton yang membayarnya.⁸

Penciptaan seni pertunjukan di Sulawesi Selatan pada 1960-an, dalam hal ini ialah seni tari, juga tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan para seniman yang aktif berperan di dalamnya. Seorang seniman mempunyai peranan dan pengaruh tersendiri di bidang kebudayaan daripada seorang tokoh agama maupun politikus. Seniman bergerak dalam ranah-ranah kultural yang lebih fleksibel dan beriring dengan perubahan-perubahan zamannya. Semisal yang terjadi dalam masa revolusi pasca kemerdekaan Indonesia (1945-1949), dimana para seniman di masa tersebut telah mengusahakan berdirinya sebuah lembaga, yang pada waktu itu disebut dengan

⁷ Penciptaan yang dimaksud disini adalah menciptakan kembali suatu hal yang baru di dalam pertunjukan seni tari dengan menghilangkan atau menggantikan beberapa hal tertentu pada bagian-bagian tari, kemudian menciptakan hal baru dalam tari tersebut yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu. Perubahan-perubahan tersebut cenderung dipandang “radikal” oleh para seniman tradisional sepuh kala itu yang memperoleh pengetahuan mengenai tari-tarian itu secara turun temurun sebagai suatu praktik ritual yang penting bagi masyarakat pedesaan dan keluarga para penguasa tradisional di Sulawesi Selatan.

⁸ R. Anderson Sutton, *op. cit.*, hlm. 90.

“sanggar.”⁹ Dalam lingkup “sanggar” maupun sebuah organisasi, para seniman menggunakannya sebagai sarana dan wadah untuk berkonsolidasi melangsungkan proses kreatifnya, guna menghasilkan karya-karya seni.

Secara teoritis, seorang seniman menurut Suryajaya (2016), berkaitan dengan fenomena ruang penciptaan seni yang di dalamnya menampilkan keanekaragaman selera dan pengalaman artistik. Hal tersebut yang kemudian membentuk pengalaman yang berbeda bagi setiap seniman dalam membentuk gagasan dan klasifikasi kenyataan di setiap karyanya.¹⁰ Seniman merupakan ungkapan subjektif yang merespresentasikan seseorang yang kreatif, inovatif, atau seseorang yang mahir dalam bidang seni.¹¹ Dalam prosesnya, seniman menggunakan imajinasi dan bakatnya untuk mencipta karya dengan nilai estetik, sesuai perspektif seniman itu sendiri dalam melahirkan sebuah kesenian.

Kesenian sendiri dalam hal ini merupakan unsur penting dalam menyangga dan memajukan kebudayaan.¹² Dalam hal ini, kesenian sangat ditentukan oleh manusia

⁹ Vincentia Marisa, *“Peranan Seniman dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945-1949,”* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), hlm. 8.

¹⁰ Martin Suryajaya, *Sejarah Estetika: Era Klasik sampai Kontemporer,* (Jakarta Barat: Penerbit Gang Kabel, 2016).

¹¹ Reny Anggraeni, *Biografi Ibu Munasiah Nadjamuddin Sebagai Seniman Tari di Makassar* (Makassar: Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Sendratasik, 2019), hlm. 3.

¹² Supriyatun, *Eksistensi Kesenian Tradisional Shalawatan Smanan dalam Tradisi Mauludan di Dusun Jolosutra Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Yogyakarta* (Yogyakarta: Fakultas Bahasa dan Seni, 2014), hlm. 1.

sebagai subjek yang aktif dalam mengungkapkan dan mengekspresikan kreativitasnya melalui kebudayaan. Manusia yang menyangga kebudayaan, sebagai penggerak kesenian, memberikan peluang untuk mencipta, bergerak, memelihara dan terus mengembangkan kebudayaan baru.¹³

Berkaitan dengan itu, penulis bermaksud untuk mengkaji dan merekonstruksi perkembangan dan pelestarian kebudayaan dalam wujud penulisan sejarah kebudayaan itu sendiri, dalam hal ini ialah kaitannya dengan penciptaan dan perkembangan terhadap seni tari di Sulawesi Selatan pada masa pasca kemerdekaan. Sebagai perintis awal eksistensi seni tari di Sulawesi Selatan, maka kita dapat menjumpai beberapa nama, seperti Seti Arti Kailola, Andi Siti Nurhani Sapada, Idha Yusuf Majid, Andi Ummu Tunru, Munasiah Nadjamuddin, serta yang hadir belakangan dengan perspektif berbeda, yakni Halilintar Lathief. Pada bagian ini, penulis hendak menitikberatkan pada dua perspektif berbeda yang dibangun oleh dua seniman tari terkenal di Sulawesi Selatan, yang tidak lain ialah Andi Siti Nurhani Sapada dan Halilintar Lathief.

Seiring perkembangan waktu dan peralihan pemerintahan di Indonesia yang silih berganti, maka kebijakan terhadap pengembangan di bidang kebudayaan, termasuk seni pertunjukan juga mulai mengalami perubahan, terutama selama masa Orde Baru pimpinan Soeharto. Penciptaan seni pertunjukan di Sulawesi Selatan, seperti tari-tarian dimulai sejak 1960-an dan 1970-an, terutama untuk menjawab ekspektasi pemerintah pusat di Jakarta, ketika Sulawesi Selatan saat itu mulai

¹³ *Ibid.*

mengalami periode yang bebas dari konflik terbuka dan berada dalam masa-masa yang kondusif. Perlahan-lahan, fungsi tari sebagai bagian dari ritual atau kepercayaan religius masyarakat setempat di Sulawesi Selatan mulai mengalami perubahan menjadi sesuatu yang dipertunjukkan di arena panggung hiburan secara umum. Meskipun demikian, pada masa Orde Baru, kebijakan budaya yang berorientasi pada “Pembangunan Nasional,” yang dicanangkan oleh pemerintah terlampau banyak mengatur dan memberikan batasan-batasan kepada seniman ataupun para pelaku seni pada waktu itu.¹⁴

Di sisi lain, kebijakan terhadap seni dan kebudayaan di Indonesia selama Orde Baru (1970-an hingga 1990-an), membuat setiap seni pertunjukan tradisional Nusantara menjadi representasi dari setiap daerah di Indonesia. Hal tersebut sebagai “cara” menangkal pengaruh negatif dari luar, melestarikan serta membangkitkan

¹⁴ Dalam praktiknya, “pertemuan budaya” memerlukan izin di sebagian besar tempat di Indonesia. Izin tersebut harus diajukan paling kurang tujuh hari sebelum acara dan izin akan dianggap telah diberikan ketika polisi sudah mengakui telah menerima permintaan tersebut [...].

Meskipun pembangunan adalah bagian dari rasionalitas liberal pemerintah, wacana pembangunan memiliki beberapa perbedaan penting di Indonesia. Alih-alih negara memfasilitasi kegiatan pekerja budaya melalui mekanisme yang menyediakan sumberdaya sementara dalam memberikan derajat kebebasan yang berkaitan dengan kegiatan yang diupayakan, kebijakan Orde Baru justru dibangun di sekitar subjek budaya normatif yang didefinisikan oleh Negara.

[...] Kebijakan Orde Baru ialah otoriter, yang memungkinkan Negara mempunyai jangkauan lebih besar untuk melakukan intervensi dalam lebih banyak unsur-unsur praktik-praktik budaya, melampaui kemungkinan memasukkan pesan pemerintah pada setiap pementasan dan terhadap dimensi estetis dari setiap pertunjukan. [...] Lihat dalam Todd Jones, *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia; Kebijakan Budaya selama Abad ke-20 hingga Era Reformasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 200-205.

kembali rasa kebanggaan lokal dan nasional. Di samping itu, kebijakan tersebut juga merupakan usaha intensif dalam menarik “dollar” wisatawan mancanegara serta membuat masyarakat umum lebih mengetahui prioritas nasional dalam bidang pariwisata.¹⁵ Sejalan dengan apa yang diistilahkan oleh Barker (2004) sebagai bentuk “kebudayaan massa” dan atau “kebudayaan pop,” ialah kebudayaan yang berbasis komoditas sebagai sesuatu yang tidak autentik, manipulatif dan tidak memuaskan.¹⁶

Berkaitan dengan itu, di sepanjang era 1950-an sampai awal 1960-an pada akhir masa Orde Lama, tidak pelak menjadi momentum bagi salah seorang seniman lokal di Sulawesi Selatan, yaitu Andi Siti Nurhani Sapada atau lebih akrab disapa dengan Ibu Nani atau Anida, dalam mengkreasikan jenis tari tradisional yang telah ada sebelumnya. Sejumlah tarian yang “diciptakan” olehnya selama tahun 1960-an, berdasarkan pada tradisi Bugis yang diangkat dari berbagai kawasan di Sulawesi Selatan. Sedangkan sejak masa Orde Baru, diciptakanlah keseragaman dan standarisasi yang kaku atas seni, sebagaimana hanya untuk keperluan festival dan perlombaan

¹⁵ Alief Nur Situdju M.N. Nadjamuddin, *et.al.*, *op. cit.*, hlm. 52.

¹⁶ Baca Chris Barker, *Cultural Studies: Teori & Praktik*, hlm. 47. [...] “kebudayaan massa” kapitalis yang terkomodifikasi tidak autentik, karena tidak dihasilkan oleh “masyarakat,” manipulatif karena tujuan utamanya adalah agar dibeli, dan tidak memuaskan karena, selain mudah dikonsumsi, ia pun tidak mensyaratkan terlalu banyak kerja dan gagal memperkaya batin konsumennya. Pandangan ini dipegang teguh oleh kritikus konservatif seperti Leavis dan oleh Mazhab Frankfurt yang terilhami oleh gagasan Marxis. Adorno dan Horkheim memadukan frase “industri kebudayaan” untuk menunjukkan bahwa kebudayaan kini sepenuhnya saling berpautan dengan ekonomi politik dan produksi kebudayaan oleh perusahaan-perusahaan kapitalis.

saja.¹⁷ Keberagaman yang sifatnya estetik, apalagi nilai-nilai spiritual sebuah pertunjukan seni tari semakin pudar. Dalam masa itulah, muncul seorang seniman lainnya, dengan perspektif, gagasan dan ideologi berbeda atas seni tari yang berkembang waktu itu, yakni Halilintar Lathief. Pada saat itu, ia melihat adanya pergeseran nilai-nilai sakral yang tersirat dalam setiap aspek seni pertunjukan, terutama seni tari di Sulawesi Selatan.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai penciptaan, modifikasi, perkembangan, serta pelestarian seni tari dalam wacana kebudayaan yang dihadirkan oleh Orde Baru, melalui riwayat hidup dan sepak terjang kedua seniman terkemuka Sulawesi Selatan yang telah disinggung sebelumnya, yakni Andi Siti Nurhani Sapada dan Halilintar Lathief. Selain itu, juga untuk melihat bagaimana corak kebudayaan yang terbentuk akibat dari relasi kuasa yang terjadi sejak masa Orde Baru hingga awal Reformasi. Berdasarkan pemaparan tersebut, disusunlah judul penelitian skripsi, yakni **“Sejarah Seni Pertunjukan: Penciptaan dan Perkembangan Seni Tari di Sulawesi Selatan 1960-2000-an.”**

2. Batasan Masalah

Laiknya penulisan sejarah pada umumnya, terdapat setidaknya dua batasan di dalam penulisan ini. Pertama batasan temporal, yaitu batasan yang mengatur perihal periodisasi, atau dengan kata lain pengambilan mengenai rentang tahun atau waktu dalam sejarah, untuk kemudian direkonstruksi menjadi sebuah tulisan. Kedua, ialah

¹⁷ Wawancara dengan Halilintar Lathief pada 28 Agustus 2020.

batasan spasial, yang mengatur batasan tempat, daerah, wilayah dan atau ruang yang hendak dikaji dalam penulisan ini.

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulisan mengenai sejarah seni pertunjukan: penciptaan dan perkembangan seni tari di Sulawesi Selatan ini akan mengambil batasan waktu sejak 1960 hingga 2000-an. Alasan memilih tahun 1960-an sebagai waktu awal penulisan disebabkan pada masa itu, sejumlah tari-tarian mulai diciptakan oleh Andi Siti Nurhani Sapada, berdasarkan pada tradisi tarian di Sulawesi Selatan. Hal ini juga bertepatan dengan masa awal pemerintahan Orde Baru dengan kebijakannya yang mulai membuat seni diseragamkan berdasarkan selera penyelenggara kompetisi seni atau festival kesenian. Perkembangan seni tari di Sulawesi Selatan sejak masa Orde Baru hingga menjelang era Reformasi kemudian dilanjutkan oleh Halilintar Lathief, yang memelopori kembalinya aspek ritual dalam semua jenis seni pertunjukan, terutama seni tari. Penulisan waktu akan berakhir pada awal 2000-an, ketika reformasi mulai membuka kembali peluang untuk keberagaman dalam berkesenian hingga dewasa ini. Sementara untuk batasan tempat, maka penulis lalu menjadikan wilayah Sulawesi Selatan, terutama Kota Makassar sebagai lokasi pengkajian dalam penulisan ini, dimana sejumlah seniman telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berproses dalam lingkup seni tari di ibukota Provinsi Sulawesi Selatan tersebut.

3. Rumusan Masalah

Penulisan skripsi ini disusun sedemikian rupa dan sesederhana mungkin, guna menjawab beberapa poin di bawah ini, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan seni tari di Sulawesi Selatan pada 1960-2000-an?
2. Bagaimana peran seniman lokal serta pemerintah daerah maupun pusat dalam menciptakan dan mengembangkan seni pertunjukan berupa seni tari, sebagai upaya dalam membentuk kebudayaan di Sulawesi Selatan masa kini?

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan seni tari di Sulawesi Selatan pada 1960-2000-an.
2. Selanjutnya, ialah untuk mengetahui peran para seniman lokal serta pemerintah daerah maupun pusat dalam menciptakan dan mengembangkan seni pertunjukan berupa seni tari, sebagai upaya dalam membentuk kebudayaan di Sulawesi Selatan masa kini.

4.2 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana strata satu di Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.
2. Bagi mahasiswa, khususnya Departemen Ilmu Sejarah, sekiranya penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dalam penulisan tugas maupun skripsi yang ingin membahas mengenai tema yang sama.

5. Tinjauan Pustaka

Sebagaimana karya sejarah yang erat kaitannya dengan fakta-fakta sejarah, maka peninjauan pustaka dalam penulisan ini amatlah penting. Selain untuk melakukan proses pengumpulan sumber, peninjauan dan kajian pustaka, proses tersebut turut melatih nalar kritis penulis, maupun peneliti sejarah dalam kerjanya. Dalam hal ini, penulis telah merancang beberapa pustaka atau sumber, yang sekiranya akan menjadi titik acuan dalam menyusun penulisan skripsi ini.

Sebagai sumber primer, penulis dalam kelanjutannya akan menggunakan sumber-sumber yang terdapat di Arsip, data-data wawancara, baik dengan kerabat-kerabat seniman maupun sanak keluarga yang sekiranya penulis dapat akses guna memperoleh informasi atau keterangan terkait dengan yang hendak dikaji oleh penulis. Selain di atas, penulis juga menyertakan buku-buku karya tokoh-tokoh seniman terkemuka Sulawesi Selatan sebagai data pendukung penulisan skripsi ini.

Sejalan dalam mengumpulkan sumber primer, maka penulis juga telah merencanakan waktu untuk melakukan wawancara dengan salah seorang seniman tari terkenal di Makassar, yaitu Halilintar Lathief, yang juga selaku tokoh sejarah yang berpengaruh terhadap perkembangan kebudayaan di Sulawesi Selatan, khususnya seni tari. Pada 28 Agustus 2020, wawancara perdana telah dilakukan selama kurang lebih 4 jam di salah satu kedai kopi di Makassar. Dalam prosesnya pada hari itu, beliau juga menawarkan beberapa karyanya yang masih bersifat manuskrip untuk dijadikan sebagai sumber-sumber tambahan dalam penulisan ini.

Buku-buku lainnya yang kemudian menjadi sumber sekunder utama, salah satunya ialah “Pakkurru Sumange’: Musik, Tari dan Politik Kebudayaan Sulawesi Selatan”¹⁸ karya R. Anderson Sutton. Buku tersebut membahas secara komprehensif mengenai perkembangan dan dinamika dunia kesenian di Sulawesi Selatan sejak 1940-an dalam perspektif seni tradisional. Dalam buku tersebut, Sutton menjadikan Andi Nurhani Sapada sebagai subjek kajian, beserta Halilintar Lathief, yang ia bahasakan sebagai seorang “pelopor pertunjukan ritual.”¹⁹

Kemudian setelah itu, ada buku-buku karya Halilintar Lathief. Salah satunya ialah buku beliau bersama dengan istrinya, Niniek Sumiani, yang berjudul “Pustaka Wisata Budaya: Tari Daerah Bugis Tinjauan melalui bentuk dan fungsi.”²⁰ Di dalam buku ini, terdapat beberapa bagian yang menunjukkan perspektif Halilintar Lathief sebagai seorang seniman yang mengetengahkan ritual sebagai wujud karyanya. Terdapat pula langkah-langkah teknis dalam melakukan tari-tarian beserta makna yang terkandung di dalamnya.

¹⁸ R. Anderson Sutton, *Pakkurru Sumange’: Musik, Tari, dan Politik Kebudayaan di Sulawesi Selatan* (Makassar: Penerbit Innawa, 2014).

¹⁹ R. Sanderson Sutton, *Ibid.*, hlm. 96.

²⁰ Halilintar Lathief dan Niniek Sumiani HL., *Pustaka Wisata Budaya: Tari Daerah Bugis (Tinjauan melalui bentuk dan fungsi)*, (Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan Nasional, 2000).

Buku “Nuansa Pelangi”²¹ karya Andi Siti Nurhani Sapada, dipilih penulis sebagai data-data yang akan menjelaskan sosok Anida lebih dekat, baik dalam pemikirannya serta realitas sejarah yang terjadi ketika karya tersebut dituliskan. Adapula buku selanjutnya adalah “Tari Kreasi Baru Sulawesi Selatan,”²² buku ini sebagai sumber sangat penting untuk meninjau kerja-kerja teknis tokoh dalam kegemarannya terhadap dunia seni. Terakhir, yang tak kalah penting ialah buku adaptasi dari tesis S2 Nurwahidah, yang berjudul “Hj. Andi Siti Nurhani Sapada: Dari Sangkar Saoraja menuju Pentas Dunia.”²³

6. Metode Penelitian

Dengan maksud untuk merekonstruksi realitas sejarah ke dalam tulisan, sudah barang tentu metode yang digunakan ialah metode penelitian sejarah. Dalam pengertiannya menurut Garraghan (1984), metode sejarah merupakan seperangkat azas atau kaidah-kaidah sistematis, yang diubah untuk membantu mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilai (kritik) secara kritis, kemudian disajikan dalam sebuah sintesis yang berbentuk tulisan.²⁴

²¹ Andi Siti Nurhani Sapada, *Nuansa Pelangi*, (1997).

²² Andi Siti Nurhani Sapada, *Tari Kreasi Baru Sulawesi Selatan*, (CV. Riantira, 1975)

²³ Nurwahidah, *Hj. Andi Siti Nurhani Sapada: Dari Sangkar Saoraja Menuju Pentas Dunia*, (Yogyakarta: Penerbit Bio Pustaka, 2004).

²⁴ Gilbert J. Garraghan, *A. Guide to Historical Method*, (New York: Fordham University Press, 1984), hlm. 54-57.

Berkaitan dengan pengertian di atas, maka dasar utama dalam merekonstruksi suatu peristiwa sejarah dalam bentuk penulisan atau kisah sejarah berawal dari dokumen-dokumen dan sisa-sisa ingatan tentang suatu kejadian, baik dalam bentuk tulisan, benda-benda peninggalan atau keterangan-keterangan lisan. Sebagaimana juga yang Kuntowijoyo katakan, bahwa dalam pekerjaan kesejarahan, terbagi dalam kajian teks, kajian konteks sejarah, dan kajian antar teks dan masyarakatnya.

Dalam konteks ini, penulisan sejarah kebudayaan oleh Kuntowijoyo (2003) merupakan sesuatu yang penting dalam khazanah historiografi di Indonesia. Penulisan sejarah kebudayaan ialah usaha untuk mencari pola-pola kehidupan, kesenian, dan pemikiran dalam waktu yang bersamaan. Sejarah kebudayaan sendiri bisa dibilang sebagai “pusat” yang kemudian bercabang ke dalam bentuk penulisan sejarah tertentu, sebagai contoh sejarah kesenian, cinta, agama dll. Kuntowijoyo kemudian menekankan, bahwa dalam setiap penulisan sejarah, atau dalam hal ini sejarah kebudayaan, setiap sejarawan atau seorang peneliti sejarah tidak boleh lepas dari tema utama “grand theme” yang telah diusung sebelumnya.²⁵

Sekali lagi, bahwa metodologi yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah, yang meliputi metode pencarian dan pengumpulan sumber-sumber data dan fakta. Selanjutnya, dengan merekonstruksi kumpulan data dan fakta tersebut ke dalam sebuah cerita dan atau tulisan yang dapat dianggap sebagai sebuah karya tulis ilmiah.

²⁵ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah (edisi kedua)*, (Yogyakarta: Tirta Wacana, 2003), hlm. 142-143.

Dalam usaha mengungkapkan dan merekonstruksi obyek permasalahan dalam penelitian ini, maka diperlukan cara kerja yang efektif agar lebih sistematis dalam proses penelitian menurut metodologi penelitian yang dipergunakan oleh para sejarawan. Maka sekiranya, terdapat beberapa tahap-tahapan yang akan dilalui, yakni sebagai berikut:

Pertama-tama adalah pengumpulan data, yang mana merupakan langkah awal berupa pencarian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah primer maupun sekunder yang berkaitan dengan judul penelitian dan atau skripsi yang akan ditulis. Seyogyanya dalam tahap ini terdapat tiga bentuk penelusuran sumber, yaitu penelitian kepustakaan, penelitian lapangan atau wawancara dan penelitian kearsipan.

Kemudian dalam penelusuran kepustakaan, penulis menggunakan buku-buku, artikel dan tesis yang berhubungan dengan judul penelitian. Adapun pada jalur kearsipan, penulis melakukan pencarian kearsipan secara langsung dan tidak langsung yang memiliki hubungan dan dapat mendukung penulisan ini. Pada jalur kearsipan ini, penulis mencari data di Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan. Dan tak lupa, jika memungkinkan mencari data utama lainnya di Arsip Nasional Indonesia (ANRI) di Jakarta.

Langkah berikutnya yang ditempuh oleh penulis adalah kritik sumber dan atau kritik intern. Pada tahap ini, dilakukan pengujian terhadap sekumpulan data dan fakta dari beberapa sumber yang didapatkan. Kritik intern ini dipergunakan untuk dapat mengetahui kesesuaian sumber dengan isinya dan membedakan apakah sumber itu

rasional atau tidak rasional. Selanjutnya adalah interpretasi, penulis menafsirkan fakta-fakta dari data-data yang telah teruji kebenarannya sesuai dengan penggunaan metode kritik sumber yang ditempuh.

Terakhir adalah penulisan sejarah, dengan kata lain menyajikan data dan fakta yang telah ada dari proses sebelumnya dalam kurun waktu 1960-hingga 2000-an, di sekitar awal era Reformasi. Disusun secara kronologis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dengan patokan prinsip kausalitas dalam memahami dan menganalisis suatu fakta. Prinsip ini merupakan suatu ciri esensial bagi ilmu sejarah dan ilmu sosial. Jadi, melalui analisis sejarah ini akan diperoleh pengetahuan dari tahun 1960-an sampai tahun 2000-an mengenai perkembangan seni tari di Sulawesi Selatan, berdasarkan data-data yang dihimpun ke depannya. Sehingga dengan harapan yang besar, dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian tentang historiografi lokal di Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan.

7. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi yang berjudul “Sejarah Seni Pertunjukan: Penciptaan dan Perkembangan Seni Tari di Sulawesi Selatan 1960-2000-an,” ini akan dibagi ke dalam lima bab, antara lain:

- 1. Bab Pertama,** yakni pendahuluan, tersusun atas latar belakang yang memuat landasan historis dan konseptual penelitian. Lalu, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka serta sistematika penulisan.

2. **Bab Kedua**, akan membahas mengenai sejarah seni pertunjukan secara umum di Sulawesi Selatan, lalu dispesifikkan menjadi sejarah seni tari, khususnya di Kota Makassar, sejak akhir masa Hindia Belanda hingga setelah kemerdekaan. Dalam bab ini akan dijelaskan sejarah serta kondisi sosial-politik dan kebudayaan di Sulawesi Selatan pada masa-masa transisi kekuasaan, dari pemerintah kolonial ke pemerintah Indonesia yang juga ikut terlibat peran besar dalam pengembangan kebudayaan di Indonesia, tidak terkecuali di Sulawesi Selatan.
3. **Bab Ketiga**, pada bagian ini akan diuraikan tentang perkembangan tari-tarian yang sudah ada dan berkembang di Sulawesi Selatan sebelumnya dari masa Orde Lama hingga menjelang era pemerintahan Orde Baru. Dalam bab ini juga akan dibahas tentang kebijakan-kebijakan Orde Baru dalam menciptakan keseragaman dan standarisasi yang kaku atas seni serta upaya-upaya awal para seniman di Sulawesi Selatan dalam memajukan seni tari yang pada saat itu belum banyak berkembang dan masih dalam bentuk yang sederhana serta juga terbatas pada kalangan, tempat, dan waktu tertentu saja.
4. **Bab Keempat**, akan membahas mengenai riwayat singkat dari dua orang tokoh seniman tari terkenal Sulawesi Selatan, yakni Andi Siti Nurhani Sapada dan Halilintar Lathief serta peran mereka dalam menciptakan dan mengembangkan seni tari sebagai upaya membentuk dan melestarikan kebudayaan di Sulawesi Selatan masa kini. Bab ini juga akan memberikan bahasan singkat mengenai beberapa contoh seni tari yang diciptakan maupun dikembangkan oleh kedua seniman di atas, serta mengenai perkembangan seni

tari di Sulawesi Selatan pada akhir masa Orde Baru dan awal masa Reformasi pada tahun 2000-an. Bab akan membahas peranan tokoh-tokoh di atas dalam mengubah dan atau mengembalikan perspektif spritiul seni pertunjukan, yang dianggap sudah sangat terstandarisasi saat itu. Di sini juga akan disinggung mengenai peran Andi Siti Nurhani Sapada maupun Halilintar Lathief dalam berorganisasi.

5. **Bab Kelima**, akan memberikan kesimpulan, penutup dan paragraf pelengkap lainnya dari keseluruhan bab dalam skripsi ini. Tidak lupa juga, penulis sertakan daftar pustaka dan lampiran sumber sebagai penuntun penyusunan skripsi ini secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN AWAL SULAWESI SELATAN DAN SENI PERTUNJUKAN 1930-AN SAMPAI 1960-AN

1. Sulawesi Selatan di Sekitar Akhir Pemerintahan Hindia-Belanda sampai Awal Orde Lama

Menjelang akhir pemerintahan Hindia Belanda, di Sulawesi Selatan telah muncul imajinasi tentang satu kesatuan yang bernuansa kedaerahan. Hal tersebut ditengarai dengan munculnya bangsa Belanda sebagai “Ratu Adil” di tengah tengah masyarakat yang multi-etnis tersebut.¹ Berangkat dari *Pax Nederlandica*² di awal abad ke 20, pemerintah Hindia Belanda menjajikan ketertiban dan keamanan di Sulawesi Selatan.³ Namun, usaha atau janji tersebut berbanding terbalik dengan realitas yang terjadi kemudian, akhirnya masyarakat Sulawesi Selatan melakukan perlawanan atas tindakan yang berlandaskan kesewenang-wenangan tersebut.

¹ Asyikin M., *Nasionalisme di Sulawesi Selatan 1905-1942*, hlm., 12.

² Suatu Kebijakan yang memaksakan kendali sepenuhnya atas suatu wilayah oleh pemerintah Hindia Belanda

³ Kadir H., hlm., 68, “[..] dengan alasan menegakkan ketertiban dan keteraturan , Pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1905 mulai merampas wilayah kekuasaan raja-raja di Sulawesi Selatan dengan kekuatan militer dan mengambil alih pemerintahannya.”

Perlu digarisbawahi dititik ini, bahwa jauh sebelum ditetapkan Pax Nederlandica di Sulawesi Selatan, rasa satu kesatuan telah ada di benak pribumi Sulawesi Selatan berkat aktivitas sosial maupun perdangan dengan etnis dan suku lainnya di Nusantara.¹ Sampai pada decade akhir 30-an, semangat kesatuan di Sulawesi Selatan semakin terstruktur dan mantang dengan kehadiran perkumpulan- perkumpulan pemuda dalam wadah suatu organisasi, seperti misalnya organisasi

Muhammadiyah yang membuka cabang di Makassar pada tahun 1926, kemudian ada pula Partai Persatuan Selebes Selatan (PPSS) yang dimotori oleh Najamuddin Dg. Malewa yang cukup kompromi terhadap pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya, Partai Nasional Indonesia (PNI) yang membuka cabang di Makassar pada 1929, hadir dengan politik non-kooperatifnya terhadap pemerintah kolonial berkat semangat antikolonialisme yang terus digaungkan Ir. Soerkarno sebagai pimpinan PNI kala itu.

Dalam masa perpindahan pemerintahan, ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda digantikan pendudukan Jepang, terjadi perubahan yang signifikan dalam hal Pendidikan. Masa-masa akhir pemerintahan Hindia Belanda banyak di antara sekolah-sekolah di Sulawesi Selatan ditutup, hingga akhirnya pemerintah Jepang membuka kembali sekolah-sekolah tersebut². Namun, keberadaan Jepang di bekas tanah Jajahan

¹ *Ibid.*, hlm., 2.

² Syamsu A. K., “Pemberontakan Petani Unra 1943 (*Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Sulawesi Selatan pada Masa Pendudukan Jepang*)”, (Makassar: Jurnal Makara, Sosial Humaniora Vol. 16 (1), 2012) hlm., 20.

Hindia Belanda, atau dalam hal ini Sulawesi Selatan ialah untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya di tempat lain. Meskipun demikian, pendudukan yang tak berlangsung lama itu, membawa dampak besar dalam aspek politik ekonomi dan sosial masyarakat pribumi, dengan diterapkannya politik “wajib beras” di desa-desa yang menyengsarakan, dengan di sisi lain diperkenalkannya organisasi-organisasi baru seperti organisasi yang bergerak di bidang koperasi “kumiai” dan rukun tetangga “tonarigumi”.¹ Dinamika yang begitu panjang hingga masa kemerdekaan membawa dampak yang lagi-lagi tak kalah kompleksnya pada masa pemerintahan Orde Lama oleh Presiden Soekarno. Secara garis besar masa ini adalah masa lahirnya ideologi-ideologi baru di Indonesia. Namun, yang paling menonjol adalah pemisahan dua kubu yang terjadi di antara elit politik Negara yang baru merdeka itu, tersebutlah mereka dengan Ideologi Islamis dan pihak yang berdiri dibawah ide Nasionalis dengan tujuan mencoba merangkul berbagai pihak di luar batasan agama.

Konflik kedua kubu tersebut, berlangsung lebih ketat pada pemilu pertama yang diselenggarakan pada 1955. Ketika itu dibentuklah partai politik yang pada akhirnya menerobos batas pertentangan di kalangan elit politik hingga melibatkan masyarakat luas. Dalam kondisi tersebut, turut bermunculan pula massa rakyat yang membawa semangat keagamaan dalam konteks politik maupun dalam aspek sosial.²

¹ Nagazumi A., *Pemberontakan di Indonesia pada Masa Jepang* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998) hlm. -.

Hal itu berdampak di kalangan masyarakat yang mulai menciptakan sekte-sekte baru agama yang terhitung dari tahun 1951 berdasarkan data kementrian agama RI yang menemukan kasus 73 kelompok kepercayaan masyarakat. Hingga pada 1965 tercatat kurang lebihnya ada 300 kelompok masyarakat yang mebuat sekte kepercayaan mereka sendiri.³

Jika meninjau secara luas, perkembangan kondisi masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan, dikondisikan oleh permainan elit politik yang ada beserta kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada suatu kelompok masyarakat tertentu. Hal itu pula yang kemudian terjadi sebaliknya, ketika elit politik yang berkuasa memanfaatkan fenomena yang terjadi di masyarakat sebagai landasan untuk membuat kebijakan dan aturan-aturan lainnya di masa mendatang yang memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan baik dari segi politik, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Sulawesi Selatan. Berangkat dari itu, dalam bab 2 ini, penulis akan memaparkan realitas sejarah yang terjadi di sekitar tahun kajian penelitian ini. Mulia dari posisi Makassar sebagai Ibukota Sulawesi Selatan di tengah kekacauan politik dan Budaya akibat respons atas berdirinya Negara Indonesia Timur (NIT). Dan kemudian mengenai awal mula perkembangan seni pertunjukan di Sulawesi Selatan hingga akhir Orde lama.

² Amos S., *“Ketegangan Antar Kelompok Agama pada Masa Orde Lama sampai Awal Orde Baru: Dari Konflik Perumusan Ideologi Negara Sampai Konflik Fisik,”* (Yogyakarta: Jurnal Teologi Indonesia Vol. 1(1), 2013) hlm., 29.

³ *Ibid.*, hlm 31.

2. Makassar dalam Peranannya Sebagai Ibukota Pasca Kemerdekaan

2.1 Politik

Sebagai suatu wilayah yang berada dalam posisi yang strategis, Makassar yang menjadi pusat aktivitas ekonomi maupun politik hadir sebagai sebuah representasi untuk Indonesia bagian timur, atau dalam hal ini Sulawesi Selatan. Makassar pada mulanya dikenal sebagai pelabuhan tempat lahirnya dunia niaga belahan timur Nusantara.⁴ Di samping arus ekonomi dan politik yang terus bersinggungan dengan daerah lain, terjadi pula penyerapan budaya multi-etnis baik secara sengaja maupun yang tidak disengaja di tengah-tengah riuhnya aktivitas kota.

Mengambil decade 30-an sebagai periode terakhir pemerintahan HindiaBelanda di Sulawesi Selatan terkhusus di Makassar, sepertinya cukup signifikan untuk menggambarkan kondisi Politik dan Ekonomi yang pada akhirnya diteruskan oleh pendudukan Jepang tak lama setelahnya. Berkaitan dengan itu, ada banyak kemajuan yang terjadi di Makassar kemudian, yang bermula pada awal abad ke-20 dari aspek politik ketika diterapkan gaya pemerintahan langsung oleh pegawai Belanda, dan saat Makassar menjadi kota otonom pada 1906. Dua hal tersebut yang selanjutnya membawa

⁴ Rasyid Asba, “*Integrasi Ekspor Kopra Makassar di Antara Kontinuitas dan Diskontinuitas*”, (Makassar: Jurnal Makara, Sosial Humaniora Vol. 10 (2), 2006) hlm., 58.

Makassar menjadi pusat aktivitas masyarakat dan elit birokrasi di Sulawesi Selatan.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 1945 tugas utama pemerintahan yang baru lahir tersebut, ialah menegaskan identitas bangsa. Jalan berat menuju tujuan tersebut dibayar dengan berbagai konflik yang menjadi sejarah besar hari ini. Seperti ketika terjadi pemberontakan tahun 1948 di Madiun oleh Partai

Komunis Indonesia (PKI), diterapkannya demokrasi dipimpin oleh Presiden Soekarno, pelaksanaan UUD sementara pada 1950, Nasakom dan Peristiwa yang menjadi patahan sejarah Indonesia pada tahun 1965 oleh oknum moralis dengan pihak-pihak yang dituduh sebagai bagian dari PKI.⁵ Rangkaian peristiwa politis di muka, pada kelanjutannya membentuk watak dan identitas masyarakat Indonesia secara umum, begitu pula adanya di Makassar. Dalam masa-masa awal pencarian identitas oleh Orde Lama terkhusus di Makassar, direspons dengan didirikannya Negara federal bentukan Belanda, yaitu NIT (1949-1950). Meski tak begitu lama, kondisi tersebut semakin menguntungkan posisi Makassar sebagai ibukota Sulawesi Selatan yang semakin dipenuhi fasilitasfasilitas penunjang, baik itu infrastuktur maupun suprastrukturnya sebagaimana adanya sebuah ibukota.⁶ Sebagai Ibukota, Makassar

⁵ Arsyad M., “*Partai Politik pada Masa Orde Baru dan Orde Lama*” (Makassar: Jurnal Supremasi Vol. 5 (2), 2010) hlm., 76.

menampilkan dirinya sebagai representasi masyarakat Sulawesi Selatan yang mulai mencari jati dirinya.

Namun begitu, sentimen-sentimen politik lokal mencul tak lama setelah proklamasi kemerdekaan dan juga pasca dibentuknya NIT. Kondisi yang kian tidak stabil di Makassar sejak kedatangan tentara *Koninklijk Nedelandsch Indisch Leger* (KNIL) atas kuasa *Netherlandsch Indies Civil Administration* (NICA) direspons oleh pemuda-pemuda progresif Makassar yang menginginkan kemerdekaan sepenuhnya. Dari itu, meletuslah *chaos* antara kedua belah pihak. Kekacauan yang berimbas ketidastabilan tersebut, lalu berujung dengan didatangkannya Kapten Westerling bersama pasukan khusus pada akhir tahun 1946 di Makassar. Tiga bulan yang panjang dan berat harus dibayar mahal masyarakat Sulawesi Selatan atas operasi militer Westerling alih-alih pembantaian massal di Sulawesi Selatan.⁷

Di sisi lain, dengan dibentuknya NIT melalui dua konferensi yaitu di Malino dan Denpasar menegaskan posisi Makassar sebagai pusat aktivitas politik waktu di Sulawesi Selatan maupun daerah-daerah yang termausk dalam

⁶ Ilham Dg. Makelo, “*Menjadi Kota Modern: Transformasi Kota Makassar Pada Abad ke-20*”, (Makassar: Jurnal Sejarah Vol. 1 (2), 2018) hlm., 51.

⁷ Dias Pradadimara dalam *Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950an* (Yogyakarta: Penerbit PT. Kanisius, 2014) hlm., 12.

Indonesia Timur. Tak jauh setelah itu, bermula pada tahun 1949 pemberontakan-pemerontakan mulai terjadi lagi di beberapa bagian di Sulawesi Selatan. Kali ini respons terhadap pemerintah pusat. Antara lain, Peristiwa Andi Azis, Pemberontakan Kahar Muzakkar dan Perjuangan Semesta Alam (Permesta). Benang merah perlawanan tersebut menandakan adanya respons dalam bentuk aktivitas politik oleh elit-elit lokal bersama massa yang menjadi pengikut masing-masing kelompok pergerakan.

Dalam tahun 1950-an, di Sulawesi Selatan sedang mengalami periode ketidakpastian. Hal tersebut terlihat jelas sikap pro-kontra elit-elit lokal maupun masyarakat luas terkait kebijakan pemerintah pusat. Terdapat empat pokok masalah yang ada waktu itu, ialah; permasalahan yang berkaitan dengan desentralisasi kekuasaan, penghapusan daerah-daerah swapraja, persoalan berkaitan dengan pengangkatan sudiro sebagai gubernur Sulawesi dan pemberontakan DI/TII Kahar Muzakkar⁸. Berbagai gejolak yang terjadi, serta protes yang tumbuh di kalangan masyarakat dan elit-elit lokal karena keengganan pemerintah pusat untuk melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada elit lokal dalam mengendalikan daerahnya dengan pemanfaatan sumber

⁸ Motif utamanya untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

daya yang mereka miliki, baik sumber daya manusia, maupun sumber daya alamnya.⁹

2.2 Ekonomi

Dalam salah satu tulisannya Sarkawi (2014), menuturkan bahwa, selain sebagai pusat pemerintahan, Makassar tumbuh menjadi pusat perekonomian di Indonesia bagian timur, khususnya di Sulawesi Selatan. Banyak faktor yang memungkinkan kondisi itu terjadi, dari aspek geografis, potensi alam, hingga sarana yang ada di Makassar sejak modernisasi yang berlangsung setelah kemerdekaan Indonesia. Meskipun, Makassar sebagai pusat dinamika sejarah Sulawesi selatan, telah memiliki dasar yang kuat dari segi ekonomi sejak decade 30-an ketika pemerintah Hindia Belanda masih memegang kendali. Pada masa itu kegiatan ekspor-impor telah terjadi antara suku Bugis-Makassar dengan suku dan bangsa lainnya. Pun saat itu, roda perekonomian sudah mulai ditunjang dengan keberadaan Firma, Perseroan Terbatas (PT) dan *Naamooe Vennootschap* (NV).¹⁰

⁹ *Ibid.*, Djunedding B. dalam Dias Pradadimara, hlm., 144.

¹⁰ Sarkawi dalam Dias Pradadimara, Bahar Akkase Teng, Heri Kusuma T., *Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an* (Yogyakarta: Penerbit PT. Kanisius, 2014) hlm., 104.

Sarana yang paling signifikan terkait perkembangan Makassar, yaitu Pelabuhan. Dengan adanya pelabuhan perputaran ekonomi kian lancar melalui sarana transportasi laut. Adapula komoditas-komoditas yang diperdagangkan saat itu, berasal dari hasil bumi dan laut, antara lain; damar, kopra¹¹, rotan, kulit kayu, pala, mutiara, agar-agar dl.¹² Selain komoditas yang disebutkan di muka, masih ada banyak jenis lainnya, baik yang diekspor keluar maupun yang diimpor dari luar Makassar.

Pada dekade 50-an di Makassar, terdapat beberapa perusahaan pelayaran yang menjalankan tugas sebagai distributor komoditas. Di pihak Belanda yang masih eksis di Makassar periode itu, ada *Koninkijke Paketvaart Maatschappij* (KPM) sebelum akhirnya dinasionalisasi oleh pemerintah Orde Lama menjadi Pelayaran Nasional Indonesi (PELNI), ada juga Perusahaan Pelayaran Sulawesi Selatan (PPSS). Di luar daripada dua perusahaan tersebut, kapal-kapal luar negeri turut ambil bagian, baik kapal dari Jepang, Filipina, Australia dan kapal-kapal asing lainnya.¹³ Melalui padatnya pertemuan bangsa-bangsa itu dalam roda perekonomian, dapat kita asumsikan bahwa, aktivitas

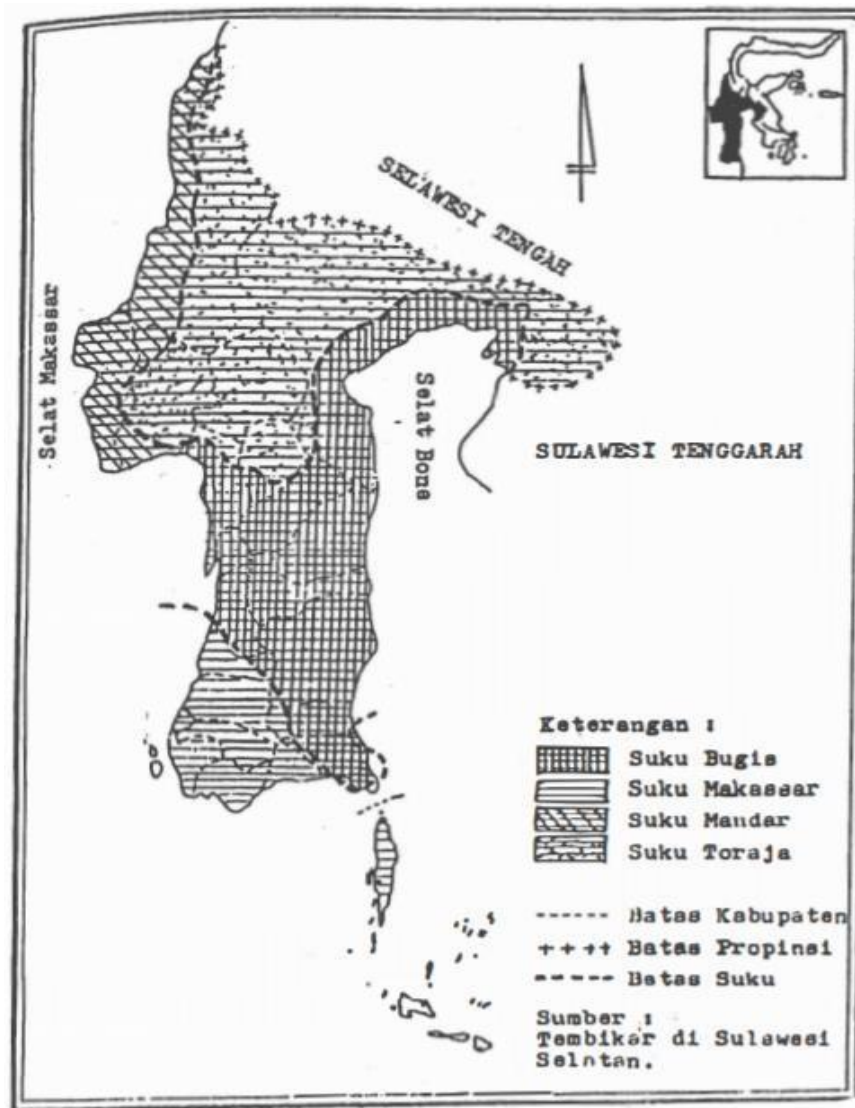
¹¹ Baca Dias Pradadimara, 2014. Hlm., 104. “Komoditi perdagangan yang sangat penting di Makassar pada waktu itu adalah beras dan kopra. Beras, selain dikonsumsi dan diperdagangkan di dalam kota Makassar, juga diantarpulaukan. Sedangkan Kopra sangat penting bagi kebutuhan bahan baku pabrik minyak goreng di samping untuk diekspor. [..]”

¹² *Ibid.*, hlm., 103.

¹³ *Ibid.*

tersebut akan diiringi dengan terjadinya penyerapan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan baru bagi masing-masing pihak yang terlibat pada periode itu.

3. Kebudayaan di Sulawesi Selatan Dekade 1930-an sampai Orde Lama



Gambar 1 (Sumber: Lathief H. dan Sumiati N., 2000)

Keragaman etnis dan budaya memiliki potensi besar dalam pembangunan dan pengembangan suatu masyarakat. Geertz (1992), menyatakan bahwa kebudayaan dibangun dari kebudayaan daerah yang tumbuh dan berkembang di setiap etnis.

Keragaman budaya yang tumbuh dan berkembang pada setiap etnis seharusnya dilestarikan eksistensinya, sekaligus dapat dijadikan landasan dalam aspek pendidikan dan lain sebagainya.¹⁴ Kebudayaan yang berkembang di Sulawesi Selatan, merupakan totalitas dari hasil pemikiran dan tingkah laku yang dimiliki oleh beragam etnis masyarakat yang ada melalui proses belajar dari generasi ke generasi. Secara normative, nilai-nilai budaya yang ideal seperti kejujuran, nilai-nilai keadilan, nilai kecendekiawanan dan nilai kepatutan.¹⁵

Dalam sistem pengetahuan kuno orang bugis, adapula aturan-aturan dan norma-norma yang selayaknya dilakukan dalam keseharian terhimpun dalam “Pangadereng” yang diharapkan mampu menciptakan stabilitas di tengah kehidupan bermasyarakat. Unsur-unsur yang terdapat dalam “Pangadereng” antara lain, (1) adek, (2) bicara, (3) rapang, (4) wari’ dan (5) sarak. Kelima poin dasar tersebut kemudian terwujud lagi dalam istilah “Sirik Na Pesse”.¹⁶ Dalam hal ini, sebagai sebuah ideologi kuno, sirik ialah nilai hakiki, martabat dan harga diri manusia. C. H. Salam Basjah dan Sappena Mustaring dalam Lathief dan Sumiati (2000), menyempitkan pengertian sirik ke dalam tiga golongan, yaitu:

¹⁴ Syarif E., Sumarmi, Fatchan A., Atina K., “*Integrasi Nilai Budaya Etnis Bugis Makassar dalam Proses Pembelajaran Sebagai Salah Satu Strategi Menghadapai Era Masyarakat Ekonomi Asean*” (Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS Vol (1) No. 1, 2016) hlm., 16.

¹⁵ Rahim, (1992).

¹⁶ Halilintar Lathief dan Niniek Sumiati, *Pustaka Wisata Budaya: Tari Daerah (Tinjauan melalui bentuk dan fungsi)* (Jakarta: Direktorat Jendral Kebudayaan, 2000) hlm., 9-10.

- (1) Sirik itu sama artinya dengan malu, isin (Jawa), shame (Inggris).
- (2) Sirik merupakan daya pendorong untuk melenyapkan (membunuh), mengasingkan, mengusir dan sebagainya terhadap siapa saja yang menyinggung perasaan mereka. Hal ini merupakan kewajiban adat. Kewajiban yang mempunyai sanksi adat, yaitu hukuman menurut norma adat jika tidak dilaksanakan.
- (3) Sirik itu sebagai daya pendorong yang bisa juga ditujukan ke arah pembangkitan tenaga untuk membanting tulang, bekerja mati-matian demi suatu pekerjaan atau usaha yang tengah dijalani seseorang.¹⁷

Di sisi lain, tiap-tiap aspek yang tertuang ke dalam kebudayaan, baik berupa pekerjaan yang dilakukan masyarakat, ilmu-ilmu yang diterapkan, kepandaian serta kepercayaan-kepercayaan yang dianut secara determinan menentukan berbagai bentuk sikap dan tindakan tiap orang dari komunitas tersebut.¹⁸ Dari situlah kemudian kebudayaan terus direproduksi untuk membentuk perilaku manusia yang taat akan aturan-aturan serta norma yang ada dalam struktur masyarakat.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 12.

¹⁸ Mattulada, *Latoa: Satu Lukisan analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press) hlm., 1-2.

Sebagai bagian dari Negara dunia ketiga, secara umum pengalaman dan penyerapan nilai-nilai budaya di Indonesia sebagian besar berasal dari ideologi barat. Dalam Jones (2015) juga dikatakan bahwa, kebijakan kebudayaan yang lahir kemudian pada pascakolonial di Indonesia, merupakan bekas-bekas dari kebijakan budaya Kolonial Belanda dan kebijakan budaya pendudukan Jepang dengan membawa nilai-nilai modernisasi dalam banyak aspek kehidupan dan atau kebudayaan di Indonesia. Sebagai contoh paling signifikan terjadi dalam sistem dan logika pemerintahan, yang kemudian merambah langsung ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kebijakan kebudayaan antara pemerintah Kolonial, pendudukan Jepang dan kaum nasionalis merupakan sesuatu yang mampu mengubah atribut penduduk melalui perhatian terhadap perilaku individu, yang kemudian ditransformasikan menjadi program-program pemerintah. Program-program sebagaimana yang dimaksud dapat berupa sudut pandang ideal pemerintah terhadap bagaimana kebudayaan yang semestinya, dapat berupa pagelaran seni pertunjukan, pendanaan festival kebudayaan atau yang sifatnya permanen seperti pendirian museum dll. Di Sulawesi Selatan sendiri, kita dapat memosisikan kebudayaan sebagai suatu identitas yang cair dan berkembang sesuai perubahan sosial, politik maupun ekonomi di ruang lingkup yang sama¹⁹. Dalam hal ini kebudayaan terbentuk melalui memori kolektif yang direpresentasikan melalui beragam praktek dan ritual budaya, yang pada kelanjutannya melahirkan sebuah sifat ‘kemodernan’.

¹⁹ *Ibid.*

Di Sulawesi Selatan, atau dalam hal ini Makassar, gerak kebudayaan kian kompleks memasuki decade 1930, dengan memperhatikan kelengkapan fasilitas kota pada masa itu.²⁰ Dengan kata lain, budaya yang berkembang dan maju berbanding lurus dengan Modernisasi kota yang ada, baik dari pengaruh budaya luar maupun budaya asli yang terus menyesuaikan bentuknya. Keberagaman budaya yang ada dewasa ini, merupakan hasil reproduksi realitas sejarah pada penghujung pemerintahan Hindia Belanda tersebut. Oleh Dias (2013), tahun 1930, setidaknya terdapat 3500 penduduk Eropa, lebih dari 15.000 cina, dan lebih dari 65.000 bumiputera berbaur dari seluruh pelosok Hindia. Akibat kepadatan etnis itu, berbagai macam aturan dikeluarkan pemerintah setempat guna mengatur system pemukiman, maupun kegiatan-kegiatan publik yang hendak dihelat di sekitar Kota.

Semakin ketat dan kuatnya perubahan dalam sistem politik, sosial dan ekonomi tersebut di Sulawesi Selatan, memaksa setiap bagian dalam ranah kebudayaa turut beradaptasi. Sebagai perhatian penting , utamanya di kalangan seniman maupun penikmat seni masa itu, ialah memudarnya semangat dan jiwa kedaerahan yang didominasi atas hegemoni budaya jawa, juga selera global dan modernisasi yang kian menarik kalangan muda.

4. Seni pertunjukan di Sulawesi Selatan 1930-an sampai 1960-an

²⁰ [...] Di masa itu, listrik, seperti juga gas, dilayani oleh perusahaan swasta dan terdapat 4.342 pelanggan listrik di Kota Makassar yang menggunakan 4,7 juta kilowatt jam tenaga listrik. [...] Kemudian, sejak 1924 pemerintah kota sudah menyediakan fasilitas air minum yang memadai. Baca, Dias Pradadimara, Dari Makassar ke Makassar: Aspek Demografi dan Politik Proses “Etnisasi” Sebuah Kota (Jurnal Populasi Vol. 14 (1), 2013) hlm., 81.

Kebudayaan sebagai pengikat atas banyaknya kebiasaan-kebiasaan dan norma yang disepakati dalam suatu komunitas, tergambarkan pula dalam ragam seni pertunjukan yang ada. Seni pertunjukan atau dalam hal ini seni tari (sere atau jaga), khususnya bagi kalangan Bangsawan Sulawesi Selatan bertujuan untuk membentuk perbuatan, tingkah laku, gerak-gerik (*kedo*) dan tutur bahasa (*ampe*) menjadi mulia. Seorang Bugis Makassar harus menjaga dan waspada agar gerak-gerik, tutur bahasa, niat hati nuraninya selalu selaras, sebagaimana nasehat-nasehat baik yang dipercaya oleh leluhur.

Terlepas daripada itu, seni pertunjukan ialah salah satu manifestasi kebudayaan yang cukup tua di Sulawesi Selatan. Sejak lama, kegiatan ini dihelat di pusat-pusat kampung. Pusat dari perkampungan lama disebut *posiq tana* atau pusat negeri. Adapula sebutan lain yang merujuk penempatan ini nadalah *pong wanua* (inti negeri) atau *alewanua*. Di tempat ituah biasanya terdapat pohon beringin besar yang biasanya dekat dari sana terdapat tempat peribadatan kuno *saukang*. Pada masa kolonial dan bahkan jauh sebelumnya tepat disekitar ‘inti negeri’ tersebut diadakan tari-tarian pemujaan kepada leluhur setiap setahun sekali sebagai tanda rasa syukur atas keberkahan dan rezeki sepanjang tahun.²¹ Selain tari-tarian pemujaan, sebelum kemerdekaan atau masa revolusi Indonesia, telah banyak ragam jenis tari tarian dan musik ritual yang dipertunjukkan secara teratur baik itu di pusat kampung maupun di istana-istana kerajaan dan desa-desa di Sulawesi Selatan. Kebiasaan pementasan itu,

²¹ *Locit.*, hlm. 40-42.

biasanya dipertontonkan untuk tamu dari pemerintahan Kolonial maupun tamu-tamu yang datang dari luar negeri²²

Decade 40-an dan 50-an di Sulawesi Selatan bisa dibilang sebagai fase kemunduran dan atau kemandegan dalam ranah perkembangan seni pertunjukan yang mengalami kondisi cukup rumit dalam artian etnis, yang mana kala itu etnis Jawa yang memegang dominasi di penjuru Nusantara. Di lain sisi, mengingat pula kondisi politik yang tidak stabil menjelang proklamasi Kemerdekaan semakin menyulitkan perkembangan seni pertunjukan. Ada banyak warisan kebudayaan yang seyogianya dapat terus dikembangkan beriring perkembangan zaman, baik dalam sumber-sumber tertulis maupun melalui ingatan-ingatan para pelaku seni terdahulu. Jalan berat dan penentangan datang dari luar dan dinamika politik internal Sulawesi Selatan.

Masalah itu dapat kita lihat ketika ritual tari-tarian tersebut mendapat penentangan dan penolakan yang keras dari para pengikut Darul Islam dan Muhammadiyah. Misalnya praktik pemujaan roh dan ihwal magis lainnya yang dianggap nmenyekutukan Tuhan yang Esa, serta makna-makna erotis yang terkandung dalam beberapa jenis tari-tarian dan seni pertunjukan .²³ Masa-masa itu juga menjadi

²² Seorang jurnalis dan Sejarawan, Claire Holt pada suatu kali ketika berkunjung di Sulawesi Selatan pada decade 30-an turut menyaksikan dan mendokumentasikan beberapa ritual bergenre tari, antara lain: Pakarena Bura'ne Makassar, Pagellu' dan Mabbdong Toraja, Pajaga Bugis dan beberapa tarian Bissu Bugis). Atas bantuan dan akses dari pejabat Belanda, Holt berkesempatan menyaksikan dan mengatur pertunjukan khusus untuknya selama lawatannya ke Sulawesi Selatan. Baca, Sutton A., *PAkkuru Sumage: Musik, TAri, dan Politik Kebudayaan Sulawesi Selatan* (Makassar: Penerbit Innawa, 2013) hlm., 62-63.

ingatan kelam bagi para pelaku seni, dalam hal ini *Bissu*²⁴ yang ditentang keras oleh masyarakat Sulawesi Selatan penganut Islam, yang dianggap mengkhianati kodrat sang pencipta.

Selepas bubarnya NIT dalam waktu yang singkat, stigma negatif (baca: peminggiran) yang ditujukan bagi sebagian besar etnis Sulawesi terkhusus di Sulawesi Selatan semakin terasa, mengingat dominasi orang-orang Jawa yang juga semakin kuat. Hal itu memaksa Presiden Soekarno mencari cara untuk memulihkan segala kecurigaan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat Negara yang baru seumur jagung tersebut. Media yang ia pilih, adalah penciptaan kembali dan pengembangan seni pertunjukan yang telah ada sebelumnya.

Soekarno memberikan andil yang besar dalam menciptakan atmosfer yang sekarang berlangsung di Indonesia, di mana seni pertunjukan daerah dengan akarnya yang dihidupkan kembali dianggap sebagai modal kebudayaan, bukan hanya bagi salah satu wilayah tertentu, melainkan lebih luas yaitu bagi bangsa Indonesia.²⁵ Dalam kondisi yang tidak menentu bagi masyarakat Sulawesi Selatan, seni pertunjukan yang

²³ *Ibid.*

²⁴ Bissu diserap dari bahasa India *biksu* (pendeta Buddha), bissu di Sulawesi Selatan diduga telah ada sejak satu abad yang lalu melalui interaksi mereka dengan pejabat beragama Buddha di Sumatera. Mengenai kemunculan Bissu juga dalam dilacak melalui epos I La Galigo yang menyebutkan rentang abad ke-13 dan 14 di Sulawesi Selatan sebagai abdi kerajaan yang menjaga benda-benda pusaka. *Pakkuru Sumange*, hlm., 43-44.

²⁵ R. Anderson Sutton *Locit.*, hlm., 64.

berakar dari tradisi tetap mereka jalankan secara diam-diam, alasannya bukan hanya akibat gerakan kebangsaan yang dirancang pemerintah pusat, tetapi sebagai bagian dari kepercayaan, keyakinan dan semangat religious masyarakat, khususnya yang bermukim di pedalaman dan jauh dari gangguan Darul Islam.

Kemunduran pengembangan seni pertunjukan (baca: seni tari) pada masamasa tersebut di muka di Sulawesi Selatan, menemukan momentum kebangkitannya ketika pada 1953, presiden Soekarno datang berkunjung ke Makassar selepas ultimatum menyerah yang ditujukan kepada pasukan Andi Azis agar menghentikan operasi militernya di Sulawesi Selatan. Waktu itu, rombongan kepala Negara disambut tari *Pakarena* versi baru, yang telah lama disempurnakan Andi Siti Nurhani Sapada (Ibu Nani) pada tahun-tahun sebelumnya. Sejak saat itu, pementasan seni tari akhirnya dijadikan kegiatan wajib setiap 17 Agustus sepanjang pemerintahan Orde Lama.²⁶

Tahun-tahun berikutnya selepas lawatan Ir. Soekarno, perkembangan seni tari kian pesat dibawah sepak terjang Ibu Nani dalam menciptakan kembali ragam taritarian tradisional agar sesuai dengan zaman dan penikmatnya. Semisal ketika tari *Bosara* diciptakan pada 1961 yang biasanya diadakan pada acara-acara besar suku Bugis Makassar, Tari *Pattennung* pada 1962 dan juga Tari *Donda'dondang* pada 1963 yang secara fundamental sarat akan makna erotis di setiap gerakannya. Sebagai fondasi utama untuk seni pertunjukan di Sulawesi Selatan pada decade 60-an, ditandai dengan didirikannya Institut Kesenian Sulawesi (IKS) pada 2 Juli 1962 atas inisiatif

²⁶ Nurwahidah, Hj. *Andi Siti Nurhani Sapada: Dari Sangkar Saoraja Menuju Pentas Dunia* (Yogyakarta: Bio Pustaka, 2004) hlm., 8-9.

Ibu Nani bersama kawan-kawan pelaku seni lainnya.²⁷ Berdirinya IKS ini, dalam Nurwahidah (2004), dikatakan sebagai ‘reaktualisasi dan reinterpretasi’ kebudayaan di Sulawesi Selatan.

Dengan demikian, kesenian melalui IKS dikembangkan dengan arah dan tujuan yang jelas, yakni membina moral bangsa melalui kesenian daerah yang teratur dan terarah. Berikut uraian mengenai arah organisasi IKS pada awal dibentuknya:

- (1) Mendidik pemuda-pemudi Sulawesi untuk mengetahui kesenian dan kebudayaan pada umumnya serta Sulawesi Selatan pada khususnya;
- (2) Mengadakan penelitian ilmiah tentang kesenian dan kebudayaan di Sulawesi
- (3) Mengadakan pertunjukan kesenian baik di dalam maupun di luar negeri.²⁸

Berdasarkan poin tersebut, sedapatnya menggambarkan bahwa seni pertunjukan, khususnya seni tari di Sulawesi Selatan menjelang akhir Orde Lama, mengalami kemajuan yang pesat. Seni pertunjukan tidak lagi hanya terbatas bagi kalangan-kalangan bangsawan saja dan bukan hanya untuk keperluan ritual maupun upacara adat. Jauh daripada itu, ialah bertujuan untuk hiburan publik (baca: festival, lomba dll.), kepentingan politik dalam dan luar negeri, yang dapat dibahasakan

²⁷ *Locit.*, hlm., hlm., 81.

²⁸ *Ibid.*, hlm 136.

sebagai komersialisasi kebudayaan.²⁹ Dengan perkembangan yang pesat itu, tari-tarian menjelma menjadi kegiatan wajib di setiap rangkaian acara besar (khususnya sebagai pembuka), baik itu untuk menyambut pejabat, kepala Negara, tamu luar negeri maupun tamu-tamu penting lainnya.

Seiring laju zaman, masyarakat mulai mengapresiasi seni, khususya seni tari kea rah yang lebih positif dan mulai mendapatkan tempat di hati masyarakat luas. Keresahan sosial yang mendahului kejayaan seni tari periode tersebut di muka, akhirnya membawa dampak positif bagi para seniman yang ada di Sulawesi Selatan (Ibu Nani dkk., dan juga Halilintar Lathief pada periode selanjutnya). Berikutnya, aktivitas dan proses kerja kreatif para seniman pertunjukan dan seni tari mulai memperlihatkan rasa percaya diri mereka masing-masing.³⁰

²⁹ Baca Nurwahidah (2004), hlm., 138-139 “Tari Pattenung pertama kali dipentaskan pada awal 1965 di acara Misi Kesenian Indonesia di Tanzania (Afrika Barat). Kemudian mengisi acara kesenian pada ulang tahun dasawarsa Konferensi Asia Afrika (KAA) di Gelora Senayan Jakarta serta proklamasi 17 Agustus di Istana Negara pada tahun 1965. Pada tahun 1970, mengisis acara kesenian di Paviliun Indonesia pada Expo 70 di Osaka dan turut dalam Misi Kesenian Indonesia ke Manila pada tahun 1970.”

³⁰ *Ibid.*, hlm., 142.

BAB III

KEBIJAKAN KEBUDAYAAN DAN PERKEMBANGAN AWAL SENI TARI

DI SULAWESI SELATAN ERA ORDE BARU

1. Kebijakan kebudayaan Orde Baru di Sulawesi Selatan

Seiring pergantian pemerintahan dan kebijakannya, pada masa orde baru di Makassar telah banyak terjadi perubahan dari segi pembangunan fisik kota. Hal ini ditengarai dengan wacana ‘modern’ yang terus dimunculkan oleh pemerintahan pusat pada masa itu. Adalah H. M. Patompo yang menyandang status sebagai walikota Makassar pada masa transisi Orde Lama menuju Orde Baru tahun 1965, sebagai salah satu tokoh Modernisasi yang sangat berperan. Dalam dimensi kebudayaan sendiri, program dan atau rencana kerja Patompo yaitu, “Pola Dasar Pembangunan Kotamadya Makassar 1965-1970” yang juga disebut sebagai Pemberantasan 3-K (kemiskinan, kemelataran dan kebodohan) sangat signifikan dalam membentuk Kota Makassar sebagai Kota Dagang, Kota Budaya, Kota Industri, Kota Akademi dan Kota Pariwisata.¹

Dalam masa itu, masyarakat telah memiliki beragam fasilitas, serta sarana dan prasarana yang dapat menunjang dan memudahkan kehidupan sehari-hari. Mulai dari peremajaan gedung-gedung sekolah, puskesmas, pasar, jalanan serta sarana hiburan lainnya di pusat kota, termasuk bioskop dan tempat-tempat pertunjukan kesenian.

¹ Ilham Dg. Makelo, “*Menjadi Kota Modern: Transformasi Kota Makassar Pada Abad Ke-20*” (Makassar: Jurnal Sejarah Vol. 1 (2), 2018) hlm., 56.